PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG

(Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh :

ARDILA ERIS MARANTIKA

NIM : I01215002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2019

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ardila Eris Marantika

NIM : I01215002

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikukmpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 8 Januari 2019

Yang Menyatakan

Ardila Eris Marantika

NIM.I01215002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ardila Eris Marantika

NIM : I01215002

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **" Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)",** Saya Berpendapat Bahwa Skripsi Tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 10 Januari 2019

Pembimbing

Dr. Khoirul Yahya, M.Si

NIP. 197202062007101003

PENGESAHAN

Skrispi oleh Ardila Eris Marantika dengan judul "Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 24 Januari 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr.Khoirul Yahya,S.Ag,M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji II

Dr. H.M.Ismail,M.H,M.Si
NIP.196005211986081001

Penguji III

Dr. Ibnu Ahshori,SH,MA
NIP. 195704091989031002

Penguji IV

Holilah S.Ag., M.Si.
NIP.197610182008012008

Surabaya, 8 Februari 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag.Grad. Dip. SEA,M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ardila Eris Marantika**

NIM : **I01215002**

Fakultas/Jurusan : **FISIP/Ilmu Politik**

E-mail address : **ardilaeris3169@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2019

Penulis

(Ardila Eris Marantika)

ABSTRAK

Ardila Eris Marantika, 2019, Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo). Skripsi program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah menganalisis bagaimana , Implementasi dan Problematika Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan penataan pasar waru yang masih mengalami problematika. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian ini didasarkan pada teori Merille S.Grindle, yang dimana menurut Grindle sebuah implementasi mempunyai kriteria pengukuran dalam berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Ketua Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” dan pedagang pasar waru.

Dalam Implementasi Penataan stand dan Penempatan pedagang di pasar Waru kurang maksimal karena adanya ketidak sesuaian implementator dalam menjalankan kebijakan tersebut terhadap Peraturan yang ada. Dan problematika yang ada yakni konflik para aktor serta para pedagang membentuk sebuah paguyuban yang bernama “Maju Bersama” sebagai sebuah penolakan terhadap penataan stand dan penempatan pedagang serta kembalinya pedagang pasar waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru lama .

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Problematika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 4
E. Definisi Konseptual 5
F. Penelitian Terdahulu 9
G. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka 14
   a. Pengertian Kebijakan 14
   b. Pengertian Kebijakan Publik 17
   c. Pengertian Implementasi Kebijakan 21
B. Kerangka Teori 24
   a. Teori Merille S Grindle 24
   b. Teori Van Meter 28
   c. Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 40
C. Pemilihan Subjek Penelitian 40
   a. Informan 40
   b. Objek Penelitian 41
D. Tahap-tahap Penelitian 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teknik Pengumpulan Data 45
a. Observasi 45
b. Wawancara 45
c. Dokumentasi 46
F. Teknik Penentuan Informan 46
G. Teknik Analisis Data 48
a. Reduksi Data 48
b. Penyajian Data 48
c. Kesimpulan Data 49
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 49

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Setting Penelitian 52
1. Luas Wilayah Kecamatan Waru 53
2. Batas-batas Wilayah Kecamatan Waru 53
3. Visi dan Misi Kecamatan Waru 54
4. Kondisi Administratif Kecamatan Waru 54
5. Sarana dan Prasarana Kecamatan Waru 54
6. Jumlah Penduduk Kecamatan Waru 55
7. Perekonomian Kecamatan Waru 56
B. Deskripsi Data 58
a. Implementasi Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo) 58
b. Problematika Implementasi Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo) 62
C. Analisis Data 69
a. Implementasi Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo) 69
1. Kepatuhan Implementator 70
2. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Waru 72
3. Komunikasi Antara Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan 72
b. Problematika Implementasi Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo) 73
1. Implementator 73
2. Penerima Implementasi 74
3. Konflik Para Aktor 74
a) Kepentingan Kelompok Sasaran 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keberpihakan Implementasi Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 Kepada Pedagang Pasar Waru 76
2. Manfaat Yang Diterima Oleh Pedagang Melalui Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 77
3. Perubahan Yang Diinginkan Dari Peraturan Bupati No.22 Tahun 2018..... 77
4. Ketetapan Implementasi Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Di Pasar Waru 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran..... 86

Bagian Akhir

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Lain Yang Relevan
3. Jadwal Penelitian
4. Biodata Peneliti
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. Surat Izin Penelitian

DAFTAR TABEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian 47

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Waru 55

Tabel 4.2 Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenis Dagangan 57

Tabel 4.3 Jumlah Pedagang Pasar Waru 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo sendiri Kabupaten yang mempunyai jumlah pendiduk yang padat dengan menempati 4 besar di Jawa Timur.[1] Kabupaten Sidoarjo yang terkenal dengan kota perdagangan dan Industri membuat kondisi tersebut harus membutuhkan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok maupun bahan tersier. Hal ini dapat menyebabkan tumbuhnya kelompok-kelompok yang mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor informal, salah satunya adalah pasar. Apabila peluang tersebut dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemajuan ekonomi daerah yang sangat besar dan dapat menunjang dalam kesejahteraan masyarakat.

Di Sidoarjo sendiri jumlah pasar yang ada yakni,Pasar Tradisional berjumlah 22, apabila dipresentasikan mencapai 9,52%. Sedangkan Pasar Modern berjumlah 209 atau mencapai 90,47%.[2] Dari hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan atau perbaikan pada pasar tradisional untuk menjaga eksistensi pasar tradisional agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Salah satunya membuat Kebijakan untuk menata pasar-pasar yang ada di kabupaten Sidoarjo khusunya pasar yang menempati tempat yang tidak layak.

---

[1] www.wikipedia.com (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB)
[2] www.sidoarjokab.go.id (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat Kebijakan yakni, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur tentang penataan stand dan penempatan pedagang. Dalam hal penataan stand dan penempatan pedagang yang dibuat oleh Pemerintah belum berjalan secara maksimal, salah satunya dalam penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru sudah dari tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru, hingga saat ini terdapat Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang belum juga terealisasikan.

Dalam hal Penataan stand dan penempatan pedagang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berupaya untuk menata Pasar Waru ke tempat yang baru di Jl. Brigjen Katamso Waru dekat dengan pabrik paku yang sudah didukung dengan fasilitas yang memadahi seperti parkir mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. selain itu pedagang juga dikatagorikan sesuai dengan komoditasnya yang hendak dijual, yang dimana mulai dari lapak konveksi, prancangan, ikan basah, sayuran, hingga tempe dan tahu. Hal tersebut berbeda jauh dengan kondisi pasar Waru lama yang kondisi fisiknya tidak layak untuk ditempati oleh pedagang.

Pemerintah sendiri merencanakan bahwa Pasar Waru lama hendak dibuat menjadi frontage road serta sepanjang jalan pasar waru juga hendak dibangun taman, dan kurangnya kesadaran pedagang pasar terhadap lingkungan di sekitar pasar menjadi kumuh dan menganggu keindahan tata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota juga menjadi alasan bagi Pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk menempatkan Pasar Waru lama ke tempat yang telah disediakan.

Berdasarkan analisa dan data-data sederhana yang telah dipaparkan di atas menjadi seuatu ketertarikan bagi penulis untuk menganalisa lebih lanjut dan menjadi Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul "**Problematika Implementasi Peraturan Bupati No 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang (Studi Kasus pasar Waru Kabupaten Sidoarjo).**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana Problematika Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis rumuskan,

1. Untuk mengetahui secara aktual dan faktual mengenai regulasi tentang penataan stand dan penempatan pedagang dalam studi Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui problematika yang mengambat dan mendukung penataan stand dan penempatan pedagang dalam studi di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian lanjutan bagi peneliti khususnya yang ingin mengkaji permasalahan tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar waru Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah , khususnya yang berhubungan dengan penataan stand dan penempatan pedagang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai Kebijkan Pemerintah Kabupaten serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Bupati Sidoarjo dalam setiap kebijakan,khususnya yang berhubungan dengan perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konseptual

1. Problematika

Problema atau problematika yang muncul dari bahasa inggris yakni "problematic" dengan arti persoalan atau masalah. Sementara dalam Kamus Besar Basaha Indonesia, problema bermakna suatu hal yang belum bisa diselesaikan yang menyebabkan suatu masalah.[3]

Dan dalam masalah tersebut merupakan suatu hambatan yang harus diselesaikan, dari sisi lain masalah adalah kesenjangan dengan fakta dari sesuatu yang diinginkan secara baik, guna terwujudnya hasil yang maksimal".[4] Menurut Syukir problematika merupakan suatu kesenjangan yang dimana keinginan dan realita yang diinginkan bisa menyelesaikan atau bisa dilakukan .Menurut penulis sendiri problematika merupakan suatu persoalan - persoalan uang rumit, atau susah yang dilalui dalam pelaksanaan pemberdayaan, baik yang datang dari faktor intern maupun ekstern.[5]

2. Penataan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penataan berawal dari kata tata yakni mempunyai makna aturan atau sistem.[6]Penataan adalah suatu proses, cara, perilaku menata, pengaturan dan perumusan. (Menata merupakan mengatur, merumuskan yang sinkron dengan aturan dan

---

[3]Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), 276.

[4] Muh Rosihuddin, "Pengertian Proble matika Pe mbe la jaran",da la m http: //banjire mbun. blogspot.com /2012/11/pengertian problematika pembelajaran. html (28 April 2015).

[5] Syukir, Dasar-dasar Strategi Dak wah Islami, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), 65

[6] Badudu, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 1147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

system). Dalam hal ini sebanding dari kata to mesage yang mempunyai makna mengatur.

Sementara dari suatu proses penataan bisa Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat spontak ditujukan kepada definisi manajamen. Maka, penataan brawal dari kata tata yakni sistem atau aturan. Yang dimana Sutarman mengungkapkan sistem Jadi penataan bersal dari kata tata yaitu aturan dan system merupakan kelompok elemen yang berkaitan di dalam satu kesatuan dalam melakukan sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan.[7] Jogiyanto juga mengungkapkan ,[8] "Sistem diartikan sebagai pendekatan mekasisme dengan pendekatan komponen". Di sisi lain, Jimmy L.Goal mengatakan ,[9] "sistem merupakatn suatu keterkaitan satu unut dengan unti lainnya yang dimana unit tersebut saling keterkaitan dan tidak bisa dpecahkan satu sama lain. Dan juga menuju satu kesatuan dalam suatu kerangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan jika suatu unit memiliki hambatan maka unit lainnya pun juga terhambat dalam menggapi suatu tujuan.

3. Implementasi

Menurut Ripley dan Franklin yang dikutip oleh Winarno mengatakan implementasi merupakan suatu hal yang terjadi sesudah adanya undang-undang diberlakukan yang menyerahkan suatu keuntungan (benefit) program, kebijakan, atau suatu hal jenis keluaran yang nyata (tangible

[7] Sutarman, 2009. Pengantar Teknologi Informas. Yogyakarta: Bumi Aksara.hlm 5.
[8] Jogiyanto, H.M. 2009. Analisis dan Desain. Yogyakarta: Andi OFFSET. Hlm 34.
[9] Gaol, L J. 2008. Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi. Jakarta: PT.Grasindo. Hlm 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

output). Implementasi meliputi suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor , khususnya saja para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.[10]

Menurut Grindle yang dikutip oleh Winarno, mengungkapkan pemikirannya tentang implementasi ia mengatakan peran implementasi yakni membuat suatu keterkaitan yang dapat menyederhanakan suatu tujuan dari kebijakan yang nantinya dapat diimplementasikan untuk kegiatan Pemerintah.

Hal tersebut dapat disimpulkan implementasi merupakan sekumpulan kegiatan dan yang melakukannya adalah aktor pelaksana kebijakan yang difasilitasi dengan sarana-sarana pendukung yang berlandaskan aturan-aturan yang sudah diberlakukan dalam mencapai suatu harapan.

4. Kebijakan

Menurut Carl J Federick yang dikutip oleh Leo Agustino[11] mengartikan kebijakan merupakan suatu kumpulan tindakan yang di sarankan oleh seseroang, Pemerintah maupun kelompok yang berada pada ruang lingkup yang berbeda dengan memiliki masalah-masalah maupun suatu kendala terhadap rancangan kebijaksanaan guna untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini gagasan kebijakan mengikutsertakan perilaku dengan memiliki suatu rencana dan capaian tertentu yang dimana hal ini merupakan

[10] Ripley, Rendal B. And Grace A. Franklin. Policy Implementation And Bureaucracy, Second Edition, The Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, Hlm 148.

[11] Agustino,Leo.2008. Dasar-dasar kebijakan Publik, Alfabeta: Bandung.Hlm 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu kunci terpenting dari pengertian kebijakan. Hal ini dikarenakan seperti apapun suatu kebijakan itu seharusnya menonjoklkan sesuatu apa yang kenyataanya dilakukan dan yang direncanakan dalam berbagai kegiatan yang mengacu pada suatu masalah. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseroang, pemerintah maupun suatu kelompok tertentu yang mengupayakan suatu pemilihan yang di mana hal itu menyangkut suatu keputusan untuk mewujudkan suatu tujuan.

5. Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya Impelementasi Kebijakan merupakan suatu prosedur untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Tidak hanya itu untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, kebijakan mempunyai dua pilihan langkah yakni, pertama kebijakan langsung diimplementasikan dalam wujud program ataupun melewati formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kumpulan Implementasi kebijakan bisa dilihat dengan cara awal yakni berawal dari sebuah program, ke sebuah proyek dan berlanjut kepada ke tindakan. Dalam hal tersebut model ini beradaptasi dengan prosedur yang layak dalam sebuah manajemen, yang khususnya dalam manajemen sektor publik. Yang kedua, kebijakan menurunkan beberapa program yang kemudian dijadikan sebuah proyek dan ujung-ujungnya akan terbentuk suatu tindakan-tindakan yang baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun gotong royongnya pemerintah dengan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan digunakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama pada penelitian ini. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Ilman Himawan Edi dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi kebijakan Perda No 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga." Dari hasil penelitian memaparkan implementasi dari kebijakan Perda nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga bisa dikatakan belum berjalan dengan maksimal, karena peraturan yang sudah dibuat dengan tujuan awal yakni, menjaga eksistensi Pasar Tradisional Kota Salatiga dari Pesatnya Toko Modern.

Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak berhasilnya Pemerintah Kota Salatiga dengan perantara Dinas dan UPTD pasar untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dan Dinas UPTD dalam penerapan aspek pengelolaan, pemberdayaan, serta perlindungan pasar Tradisional. Dengan jumlah pasar tradisional yang berada di Salatiga berjumlah 15 dan hanya beberapa pasar saja yang telah menerapkan Perda Nomor 12 tahun 2013 yakni, Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Dalam hal ini Pemerintah Kota Salatiga dengan implementator Dinas mereka masih kurang maksmial untuk pengimplementasiaanya. Peraturan Daerah ini yang mengatur keberadaan pedagang pasar, memberikan bimbingan kepada pedagang pasar dan menyediakan fasilitas-fasilitas fisik dengan renovasi pasar tradisional serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas pendukung Pasar Tradisional di Kota Salatiga. Akan tetapi dalam dalam aspek perlindungan Pasar Tradisional dalam penyediaan lokasi yang strategis dan menguntungkan sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan menyediakan lokasi di tempat-tempat yang strategis.[12]

Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian diatas pada metode penelitian Kualitatif dan persamaan lainnya yaitu, objeknya penelitian diatas memfokuskan pada pasar yang dimana penelitian diatas fokus pada pasar tradisional di Salatiga sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah di Pasar Waru. Sedangkan perbedaannya ialah fokus penelitian berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupa Kebijakan Pemkab dalam melakukan penataan stand dan penempatan pedagang.

Devi Mega Hestiana dalam skripsinya yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang." Hasil dari penelitian ini adalah mengenai usaha Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Ada beberapa kegiatan yang belum terealisasikan kepada PKL antara lain adanya penghapusan lokasi bagi PKL. Kebijakan pembinaan yang dilakukan untuk memberdayakan PKL sebagaian besar telah dilakukan seperti pemberian pembinaan kepada PKL, pembantuan sarana dan

[12]Jurnal Elwin Himawan Edi, Universitas Dipenegoro.Implementasi kebijakan Perda No 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prasarana dagang , dan adanya penguatan dari Pemkot untuk memperkenalkan usaha PKL di Kota Semarang.

Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian diatas pada metode penelitian Kualitatif, persamaan yang lain ialah fokus penelitian berupa kebijakan Pemerintah dalam melakukan penataan pedagang. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objeknya, penelitian diatas memfokuskan pada pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah Pasar Waru.

Wahyu Safitri, Tiantoro M.Si jurnal yang berjudul " Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional Kota Semarang." Hasil penelitian memaparkan bahwa Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 yang mengenai Pengaturan Pasar Tradisional belum terimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan pasar tradisional yang diimplmentasikan dengan lamban juga salah sasaran, misalnya saja masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam mengatur pasar tradisional, lemahnya Sumber Daya Manusia di dalam pelaksana kebijakan dan tidak adanya pembinaan terhadap pedagang, serta kurangnya fasilitas untuk memanfaatkan teknologi informasi yang menyebabkan pelayanan kurang maksimal. hal tersebut merupakan keluhan para pedagang yang dimana penagihan retribusi yang selalu melebihi target realisasi.[13]

[13] Jurnal Oleh Wahyu Savitri1, Tiantoro, M.Si.2, Dra. Sulistyowati, M.Si.3Jl. Prof. H. Soedarto, " Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional Kota Semarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian diatas pada metode penelitian Kualitatif dan persamaan lainnya yaitu, objeknya penelitian diatas memfokuskan pada pasar yang dimana penelitian diatas fokus pada pasar tradisional di Kota Semarang sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan perbedaannya ialah fokus penelitian berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengaturan Pasar Tradisional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupa Kebijakan Pemkab dalam melakukan penataan stand dan penempatan pedagang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan peneliti hendak memaparkan sistematika pembahasan , hal ini bertujuan untuk mempermudah penulisan. sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab adalah sebagai berikut :

Bab pertama , Bab ini memuat tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi konseptual.

Bab kedua , bab ini memuat tentang penelitian terdahulu, serta kajian teoritik mengenai hkikat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dikaitkan dengan teori Implementasi Kebijakan Grindle.

Bab Ketiga, bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika pembahasan.

Bab Keempat, bab ini mengenai trntang tentang penyajian dan analisis data yang akan menyajikan hasil data lapangan serta analisis terhadap Implementasi Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang studi kasus pasar waru.

Bab kelima, bab ini meemuat tentang penutup yang meliputi dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan

Apabila berbicara tentang kebijakan, kebijakan dalam Bahasa Inggris adalah *policy*, yang dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu rangkaian rencana atau harapan yang menjadi kunci utama dan rencana dalam pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, juga kepemimpinan, serta suatu cara yang berperan tentang Pemerintahan, organisasi, dan lain-lain yang dimana meliputi suatu cita-cita, tujuan prinsip dan acuan untuk mencapai suatu sasaran.[14]

Menurut Carl J Federick yang mengutip dari Leo Agustino mengartikan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan atau ruang lingkup tertentu yang dimana di dalam ruang lingkup tersebut memiliki hambatan atau masalah dan kesempatan terhadap pelaksanaan rancangan dalam kebijakan tersebut yang mempunyai tujuan tertentu.[15] Pemikiran tersebut juga menerangkan suatu gagasan kebijakan yang mengaitkan perilaku yang mempunyai tujuan dan maksud adalah salah satu penggalan yang utama dari pengertian kebijakan, hal ini terjadi karena kebijakan harus menerangkan apa yang sebenarnya

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip pada tanggal 7 Oktober 2018.
[15] Agustino,Leo.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta:Bandung.hlm 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dari apa yang dirancangkan mengenai beberapa kegiatan dalam suatu problematika.

Tidak hanya Leo Agustino, tetapi juga Solichin Abdul wahab mengatakan kebijakan adalah suatu silang pemikiran atau sebagai panggung perbincangan para ahli. Solichin Abdul Wahab juga memiliki pedoman untuk memahami apa itu kebijakan. Hal itu sebagai berikut :[16]

a. Kebijakan seharusnya dibedakan dengan keputusan
b. Kebijakan seharusnya tidak dibedakan dari administrasi.
c. Kebijakan itu mengenai perilaku dan harapan
d. Kebijakan itu mengenai ketidak adanya tindakan dan adanya suatu tindakan.
e. Kebiajakan memiliki hasil yang dapat diraih dari tiap kebijakan yang mempunyai tujuan tertentu atau sasaran tertentu baik implisit atau eksplisit.
f. Kebijakan sendiri itu muncul dari proses yang berlangsung sepanjang waktu.
g. Kebijakan juga mencakup keterkaitan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
h. Kebijakan walaupun tidak eklusif tetapi juga menyangkut peran lembaga Pemerintah
i. Kebijakan dirumuskan secara obyektif.

[16] Wahab Solichin, 1997.Analisis Kebijakan Publik. Bumi Aksara,:Jakarta.hlm 40-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budi Winarno juga mengatakan, bahwa Kebijakan (Policy Term) bisa jadi dipergunakan secara luas yang dimana seperti "Kebijakan Luar Negeri Indonesia", "Kebijakan Ekonomi Jepang", dan bisa saja digunakan untuk sesuatu yang khusus, misalkan saja kita mengatakan Kebijakan Pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. [17]Akan tetapi baik Solichin Abdul Wahab maupun Budi Winarno menyepakati bawah Kebijakan ini pemakaiannya sering dipertukarkan dengan istilah yang lainnya, seperti tujuan *(goals)* program, undang-undang, keputusan, ketentuan, standar, proposal, dan juga grand design.[18]

Menurut Irfan Islamy yang dikutip oleh Suandi, kebijakan itu seharusnya dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* yang diartikan kebijakan yang memiliki arti berbeda dengan wisdom dengan dimaknai kebijaksanaan.[19]Definisi kebijaksanaan membutuhkan peninjauan, menurut James E Anderson yang dikutip oleh Islamy, mengatakan bahwa kebijakan merupakan *"a purposivecourse of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern"* yang dapat diartikan sekumpulan kegiatan dengan memiliki tujuan yang diiringi dan dikakukan oleh seorang pelaksana atau sekumpulan pelaksana untuk menyelesaikan suatu problematika).[20]

---

[17] Budi Winarno,2005.Kebijakan Publik : Teori dan proses Edisi Revisi. Media Pressindo:Yogyakarta. Hlm 15.

[18] Suharno.2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press. Hlm 11

[19] Islamy, M Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 15.

[20] Ibid, hlm 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budi Winarno mengatakan rancangan kebijakan yang di suguhkan oleh Anderson tersebut dinilai lebih tepat dikarenakan memfokuskan perhatian kepada apa yang sesungguhnya dilakukan dan tidak hanya untuk yang dirancangkan. Di sisi lain rancangan tersebut juga menjadi pembeda secara nyata antara kebijakan dengan keputusan yang memiliki pengertian pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.[21]

Sementara itu, Richad Rose yang dikutip oleh Budi Winarno menganjurkan kebijakan seharusnya dimengerti untuk rangkaian tindakan yang dikit banyaknya berkesnimbungan dengan konsekuensi-konsekuensi untuk mereka yang terkait dari keputusan itu sendiri. Tanggapan kedua ahli tersebut seharusnya bisa menerangkan bahwa menukarkan arti dari kebijakan dengan keputusan adalah sesuatu yang keliru, dikarenakan pada intinya kebijakan diartikan sebagai tujuan atau pola kegiatan dan tidak hanya suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu.[22]

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang, maupun oleh sekolompok ataupun Pemerintah yang di dalamnya terdapat suatu keputusan yang mengupayakan pemlihan dari berbagai cara yang ada untuk menggapai suatu tujuan.

---

[21] Budi Winarno, Teori Kebijakan Publik (Pusat Antara Universitas Studi Sosial, Universitas Gaja Mada, Yogyakarta , 1989)., Hal. 17.

[22] Budi Winarno.2005.Kebijakan Publik : Teori Dan Proses Edisi Revisi,Media Presindo.Yogyakarta. Hlm 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Kebijakan Publik

Ruang lingkup studi kebijakan publik sendiri terdiri dari beberapa bidang, yakni bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, hukum dan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hirarkinya yang dimana kebijakan publik itu bersifat regional, nasional, dan lokal. Dan kebijakan publik yang disebut bersifat lokal yang terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, peraturan pemerintah provinsi atau daerah, peraturan Kabupaten atau Kota, keputusan Gubernur serta keputusan Bupati atau Walikota.

Pengertian Kebijakan Publik secara terminologi dapat diartikan secara banyak, namun tergantung kita melihat dari mana untuk mengartikannya. Menurut Easton Kebijakan Publik adalah *"the authoritatativeallocation of values for the whole society"* yang artinya kebijakan public sebagai pengalokasian nilai secara paksa kepada anggota masyarakat. Para ahli lain Seoerti Laswell dan Kaplan mengungkapkan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai *"a projected orogram of goal, value, and practice"* yang dimana keijakan public seagai program pencapaian tujuan, dan nilai-nilai yang ada di dalam praktek yang terarah.

Selain Laswell dan Kaplan, Presman dan Widavsky juga mengartikan yang dimana dikutip oleh Budi Winarno kebijakan Publik didefinisikan sebagai hipotesis yang mencakup kondisi awal dan akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan terjadi. [23]. Kebijakan publik juga harus dibedakan dengan kebijakan yang lainnya, seperti kebijakan swasta. Yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh terlibatnya faktor- faktor bukan Pemerintah. Menurut Robert Eyestone yang dikutip oleh Leo Agustino mengartikan kebijakan publik adalah penghubung antara unit Pemerintah dengan lingkungan.[24] Terdapat banyak pihak yang menganggap bahwa berarti masih belum spesifik untuk dipahami, hal itu dikarenakan arti kebijakan publik menyangkut banyak hal. Nugroho juga mengartikan kebijakan publim memiliki dua karakterisik yakni :

a. Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dimengerti, karena pada dasarnya kebijakan public digunakan untuk mendapatkan tujuan nasional.
b. Kebijakan publik adalah suatu hal yang dengan mudah dapat diukur, sebab Kebijakan publik sendiri dapat diukur dengan jelas, hal itu dapat dilihat seberapa jauh tercapainya cita-cita yang dapat ditempuh.

Menurut Woll yang dikutip dari Tangkilisan ia menyebutkan kebijakan publik merupakan beragam aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah yang berguna untuk mencari solusi problematika yang ada

[23] Budi Winarno,2005.Kebijakan Publik : Teori Dan Proses Edisi Revisi,Media Presindo.Yogyakarta. Hlm 19.

[24] Agustino,Leo.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta: Bandung.Hlm 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di masyarakat, dapat dilakukan secara langsung dengan perantara lembaga yang berpengaruh dalam masyarakat.[25]

Thomas R Dye yang dikutip oleh Islamy mengartikan Kebijakan Publik " *is what ever government chose to do or not"* yang diartikan segala sesuatu yang dipilih oleh Pemerintah utuk diberlakukan atau tak dilakukan. Istilah ini menekankan jika kebijakan publik mencakup perwujudan tindakan dan tidak pula merupakan ungkapan kemauan Pemerintah atau Pejabat yang ada di Masyarakat. Selain itu Pemerintah mempunyai pilihan untuk tidak melakukan apa-apa juga termasuk kebijakan publik karena pilihan Pemerintah itu memiliki pengaruh yang tidak berbeda jika Pemerintah melakukan sesuatu.[26]

Beberapa ahli juga megartikan kebijakan Publik adalah hal yang diambil oleh Pemerintah dalam menanggapi suatu masalah yang ada di masyarakat. Beitu juga dengan Chadler dan Planose sebagaimana yang telah dikutip oleh Tangkilisan, ia menyatakan kebijakan publik merupakan suatu kegiatan pemanfaatan pada sumber daya yang digunakan untuk memecahkan problematika yang ada di masyarakat atau Pemerintah.[27] Selanjutnya, dapat dikatakan pula kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu pola interfensi

[25] Chandler,Raphl C;Plano, Jack C.1988.The Public Administration Dictionary.Santa Barbara, California: ABC-Clio. Hlm 2.

[26] Islamy, M Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 19.

[27] Tangkilisan.2003. Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberlakukan secara keberlajutan oleh Pemerintah untuk kepentingan sutau kelompok dalam masyarakat yang kurang beruntung agar kelmpok tersebut dapat hidup dengan layak, serta dapat berpartisipasi secara luas dalam bangunan.[28]

David Easton yang dikutip oleh Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan publik sebagai " *authorities in a political system*" , kalimat ini dapat diartikan bahwa hanya seseorang yang memiliki otoritas di dalam suatu pemerintahan dan secara sah pemerintah juga dapat melakukan sesuatu pada masyarakatnya sendiri dan pilihan pemerintah untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun diimplmentasikan karena pemerintah tersebut termasuk di dalam *authorities in a political system,* yakni penguasa yang berada dalam suatu sistem politik dan memiliki tanggung jawab pada suatu masalah tertentu yang mana pada titik ini Pemerintah diharuskan untuk mengambil suatu keputusan dan kelak di kemudian hari dapat diterima dalam suatu masyarakat juga untuk mengikat anggota masyarakat dalam kurun waktu tertentu.[29]

Berdasarkan pendapat dari banyak ahli , dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan suatu Pemerintah yang difokuskan pada suatu tujuan tertentu dan berguna untuk mencari solusi problematika yang ada di amsyarakat atau demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

---

[28] Chandler,Raphl C;Plano, Jack C.1988.The Public Administration Dictionary.Santa Barbara, California: ABC-Clio. Hlm 1.

[29] Agustino,Leo.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta: Bandung. Hlm 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan yang dilakukan pemerintah terkadang berada dalam ketentuan atau undang-undang yang telah dirancang pemerintah sehingga dapat mempunyai sifat yang memaksa serta mengikat.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yakni, suatu proses untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirancang oleh suatu lembaga pemerintah yang ditujukan untuk menggapai suatu tujuan yang telah disahkan dalam keputusan kebijakan tersebut.[30]Pelaksanaan dalam proses pelayanan kebijakan dimulai jika tujuan kebijakan tersebut telah disahkan, terbentuknya program-program pelaksanaan.

Anderson menjelaskan 4 aspek yang penting dalam suatu Implementasi kebijakan.[31] Hakikat yang ada pada saat administrasi berlangsung, keptuhan suatu dampak implement.Implementasi kebijakan yang luas dalam Pemerintah adalah sebagai media untuk administrasi hukum yang mana berbagai organisasi teknik bekerja aktor, dan prosedur, bekerja bersama dengan tujuan menjalankan suatu kebijakan yang berguna untuk meraih suatu dampak atau suatu tujua yang di idamkan. Implmentasi dapat dilihat dari sisi lain, yakni implementasi merupakan fenomena yang rumit, dan mungkin dapat diartikan sebagai proses, output maupun sebagai hasil akhir. Menurut pendapat Van matter dan van Horen yag dikutip oleh winarno.[32]

---

[30] Anderson,James A. (1975). Public Policy Making : Basic Concept In Political Sciences.New York: Praeger University Series. Hlm 29.

[31] Ibid, hlm 30.

[32] Budi Winarno,Kebijakan Publik : Teori Dan Proses Edisi Revisi,Media Presindo.Yogyakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini menyebutkan baha Proses implementasi " *those actions by public or private individuals (or grup) that are directed at the achievement of objectives set for the in prior decisions"* yang artinya suatu tindakan-tindakan dilakukan oleh pejabat-pejabat, individu, ataupun kelompok Pemerintahan maupun swasta yang mengarah pada terwujudnya suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu putusan kebijaksanaan. Begitupun juga Grindle yang dikutip oleh Abdul Wahab mengartikan bahwa Implementasi Kebijakan adalah kunci penting dari keseluruhan pelaksanaan kebijakan. Implementasi tidaklah hanya berkaitan dengan mekanisme suatu pemaparan keputusan-keputusan politik yang berada di prosedur –prosedur rutin berupa saran demokrasi, lebih dari itu termasuk masalah konflik, serta kebijakan dan individu yang mendapatkan sesuatu dari suatu kebijakan.[33]

Proses kebijakan yakni suatu hal yang dianggap penting, bahkan lebih jauh penting dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan hanya berupa rancangan atau impian yang rapi tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Kegunaan Implementasikan Kebijakan yakni, berguna membentuk hubungan yang bertujuan atau mempunyai sasaran suatu kebijakan negara yang diimplementasikan sebagai hasil. Namun, di dalam pengetahuan yang ada saat ini lebih dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, serta harus diyakini bahwa akhir-akhir ini para

---

[33] Abdul Wahab Solichin.(1997). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,Jakarta : Bumi Aksara.hlm 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmuan sosial, khususnya para ahli ilmu politik memberi perhatian pada probelematika persoalan pelaksanaan kebiajakan atau juga dapat menerimanya sebagai suatu integral dari studi pelaksaan.

Proses kebijakan disusun secara pendek *to implement* (untuk pelaksaan) yang berarti *to provide the menas fof carrying out* (memfasilitasi sarana untuk melakukan sesuatu), yang berarti *to give practical effect to* (mengakibatkan pada sesuatu). Jika pendapat ini diikuti, proses kebijaksanaan dapat dilihat sebagai proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan, seringkali hal ini dapat berupa undang-undang peraturan daerah, perintah eksekutif, peraturan daerah, kepuusan peradilan atau dekrit presiden.[34]

Hal ini dapat disimpulkan implementasi kebijakan sebenarnya tak hanya selalu mengenai perilaku badan administrative yang mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan juga menyebabkan perilaku taat pada diri kelompok seseroang, melainkan juga mencakup jaringan kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang secara langsung atau tidak berpengaruh pada pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh pula pada dampak baik yang telah diharapkan juga dampak yang tidak diharapkan. Untuk lebih bisa mengeekftikan kebijakan yang telah dibuat maka perlu adanya implementasi kebijakan menurut islamy,[35] sifat kebijakan dibagi dalam dua macam yakni : a). *self Excecuting* yaki, dapat diartikan dengan dibentuknya

[34] Ibid, hlm 21.

[35] Islamy, M Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 102-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta ditetapkannya uatu kebijakan publik maka kebijakan yang dibuat tersebut akan terwujud dengan sendirinya. Misalnya, pemgakuan kemerdekaan dari negara A terhadap Negara B. b) *non self Excecuting*, yakni kebijakan publik harus diwujudkan dan dilakukan dari berbagai pihak dengan tujuan supaya pelaksanaan pembuatan kebijakan dapat tercapai.

B. KERANGKA TEORI

1. Teori Merille S Grindle

Keberhasilan suatu implementasi menurut Grindle yakni dipengaruhi dua variable yaitu, lingkungan implementasi serta isi kebijakan. Variable diatas meliputi : a) sejauh mana kepentingan suatu kelompok sasaran dimuat dalam isi kebijakan, b) manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran, c) sejauh mana perubahan yang di impikan dari suatu kebijakan, d) apa program tersebut letaknya sudah tepat, apakah kebijakan tersebut menyebutkan implementatornya dengan rinci, serta apakah program yang ada telah didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mencukupi.[36]

Model dari Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan dan implementsinya, gagasan dasarnya yakni setelah kebijakan ditranformasikan implementasi kebijakan baru dilakukan.

[36] Subarsono, AG.2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh implementability dari suatu kebijakan tersebut. Kebijkan tersebut menyangkut hal berikut :

a. Sumber daya yang dihasilkan
b. Pelaksana program
c. Manfaat yang dihasilkan'
d. Derajat perubahan yang diinginkan
e. Kedudukan pembuat kebijakan

Sementara itu, isi dari impelemntasi tersebut yakni :

a. kepatuhan daya tenggap
b. kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
c. karakteristik lembaga dan penguasa

Yang berbeda dari model Grindle berada pada pemahamannya yang komperehensif dalam konteks kebijakan, khusunya yang berkaitan dengan penerimpa implmentasi, implementator, serta lingkungan konflik yang telah terjadi antara aktor implemetasi, dan juga kondisi sumber daya implementasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan pendekatan faktual serta dan kepatuhan dapat diartikan jika suat keberhasilan kebijakan ditentukan pada tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukam sejauh mana kemampuan implementator, yaitu :

a. kemampuan implementator untuk melakukan apa saja yang dapat diartikan tepat sebagai keputusan yang pribadi untuk menghadapi pendekatan faktual, faktor organiasional, dan pengaruh eksternal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kepatuhan yang dilakukan oleh implementator mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh atasan dari implementator.

Keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat berdasarkan pandangan dari proses implemetasi dan perspektif hasil. Pada pelaksanaannya, program yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sudah berhasil jika pelaksannanya sendiri sudah sesuai dengan petunjuk yang ada serta yang telah disusun oleh pembuat program dan meliputi antara lain, kelompok sasaran, agen pelaksana, dan manfaat program. Sedangkan pada perskpektif hasil program yang telah ada dapat dipastikan berhasil jika program itu sendiri sudah membawa dampak yang sudah diinginkan. Suatu program dipandang berhasil jika dilihat dari sisi prosesnya, tapi boleh jadi dikatakan gagal jika dilihat dari dampak yang telah dihasilkan, atau juga sebaliknya.[37]

Grindle menyebutkan model implemetasi yakni, sebagai proses administrasi juga proses politik model dari Grindle tersebut dapat dilihat sebagai proses untuk pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh aktor, yang mana hasil akhirnya dapat ditentukan dengan baik dari program yang telah dicapai maupun melalui hubungan dari para pembuat keputusan. Proses politik dapat dilihat melalui suatu proses pemgambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sementara proses administrasi yang ada juga

[37] Grindle, Merilee S. 1980. Politics And Policy Implementation In The Third World, Princnton University Press, New Jersey, Hlm 6-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat melalui proses umum yang mencakup aksi admnisitratif yang telah diteliti pada program tertentu.[38]

Dalam Grindle juga adanya Kriteria Pengukuran Implemetasi Kebijakan menurut Grindle dan Quade untuk dapat mengukur kinerja implementasi dari suatu kebijakan publik harus diperhatikan pula organisasi, lingkungan, dan variable kebijakan.[39] Hal itu dapat ditunjukan melalui pilihan kebijakan yang tepat, maka masyarakat yang ada dapat ikut serta dalam konstribusi yang maksimal untuk menggapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu jika, sudah ditetapkan kebijakan yang ada diperlukan organisasi pelaksana, dikarenakan dalam suatu organisasi ada banyak sumberdaya yang dapat digunakan sebagai pelaksana kebijakan bagi pelayanan masyarakat dan juga ada kewenangan.

Sementara, lingkungan kebijakan yang ada bergantung pada karakteristiknya yang negatif atu yang positif. Jika lingkungan tersebut menanggapi secara positif terhadap kebijakan tersebut maka akan menghasilkan dukungan yang positif pula sehingga, kebijakan tersebut aka berengaruh terhadap kesuksekan kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan memberi respon yang negatif maka, lingkungan tersebut akan terjadi suatu benturan, sehingga proses yang ada dalam implementasi tersebut akan teracam tidak berhasil. Lebih dari tiga

[38] Ibid hlm 11.

[39] Quade, E.S. 1984. Analysis For Public Decisions, Elsevier Science Publishers, New York, Hlm 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek tersebut, kelompok sasaran kebijakan adalah hasil dari impelemntasi kebijakan yang menentukan dampaknya dari masyarakat.[40]

2. Teori Van Metter

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumurkan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* . Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permofmansi suatu pengejewan paham kebijakan yang pada dasarnya secara senaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan .Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu atau implementor. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

[40] Dr. Haedar Akib, M.Si., Dosen Program Sarjana Dan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Stia-Lan Dan Unismuh Makassar. Dr. Antonius Tarigan, M.Si., Kasubdit Kerjasama Kelembagaan Bappenas Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.[41]

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukasuatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan baik yang disengaja maupun tidak.

Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten .Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik

[41] Widodo,1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

3. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Daerah di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penataan Stand Dan Penempatan Pedagang Pada Pasar Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Sidoarjo.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penataan stand dan penempatan pedagang serta guna terwujudnya ketertiban, keamanan, keserasian, keindahan dan kenyamanan pasar daerah, perlu mengatur penataan stand dan penempatan pedagang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Stand Dan Penempatan Pedagang Pada Pasar Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

c. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Penataan Stand Dan Penempatan Pedagang Pada Pasar Daerah Kabupaten Sidoarjo

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
5. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
6. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
8. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Penempatan adalah pedagang pasar yang mempunyai buku hak pemakaian stand, akan ditempatkan pada bangunan stand yang baru.
10. Pedagang adalah setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas untuk berjualan di area pasar.
11. Penataan adalah menempatkan jenis dagangan yang diperjualbelikan di dalam pasar sesuai dengan zoningnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Pelataran adalah halaman pasar yang digunakan pedagang untuk berdagang.

BAB II

KLASIFIKASI BLOK STAND DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 2

1) Dalam rangka penataan pasar daerah dilakukan pengklasifikasian blok stand.
2) Klasifikasi blok stand sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

   a. Toko gudang (Togu);
   b. Kios;
   c. Los; dan
   d. Pelataran.

Pasal 3

1) Toko gudang dan kios sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, merupakan bangunan nampak depan, digunakan untuk kegiatan perdagangan dan/ atau jasa meliputi : konveksi, toko emas, apotek, bank, pracangan, elektronik, makanan kering dan jenis dagangan lainnya yang tidak menghasilkan sampah basah.
2) Los sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan bangunan posisi dalam, digunakan untuk kegiatan perdagangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi : sayur-mayur, ikan, daging, bumbu, warung makan dan jenis dagangan lainnya yang menghasilkan sampah basah.

3) Pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan bagian dari area terbuka pasar yang dapat digunakan secara non permanen, untuk kegiatan perdagangan dan/ atau jasa.

BAB III

PERUBAHAN KLASIFIKASI BLOK STAND DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 4

1) Perubahan klasifikasi blok stand dapat dilakukan dengan pertimbangan kondisi pasar, yang diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
2) Setiap pedagang dapat melakukan perubahan jenis dagangan pada blok stand dan/ atau antar blok stand yang telah ditetapkan, setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinas.
3) Pemberian izin oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan ketersediaan stand.

BAB IV

PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 5

1) Pedagang pasar diklasifikasikan menjadi : a. Pedagang Pasar yang mempunyai Buku Tanda Bukti Hak Pemakaian Stand; b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang pasar yang terdaftar dalam database pedagang; dan c. Calon pedagang baru.

2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan prioritas untuk mendapatkan stand.
3) Penempatan pedagang yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila tersedia stand.
4) Penempatan calon pedagang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah penempatan pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b terpenuhi.
5) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) didasarkan pengundian yang hasilnya ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 Dalam hal Buku Tanda Bukti Hak Pemakaian Stand yang dimiliki oleh pedagang habis masa berlakunya, wajib terlebih dahulu dilakukan perpanjangan sebelum mendapatkan hak penempatan. Pasal 7 (1) Dalam rangka penempatan pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4), Dinas membentuk Tim Seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur dinas, unsur wilayah dan instansi lain sesuai kebutuhan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan klasifikasi blok, penempatan pedagang sesuai dengan jenis dagangan dan bangunan stand dilakukan oleh Dinas.
2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penempatan Stand dan Pedagang Pasar Porong (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 19 Seri D3);
b. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Krian Baru (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 19); dan
c. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 27); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.[42]

[42] www.sjdihsisidoarjokab.go.id (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian diperlukannya suatu metode yang akan dibuat guna menerangkan mekanisme untuk menyelesaikan masalah. Sehingga penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bisa tuntas dan terimpelementasikan, oleh karena itu, peneliti hendak menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian merupakan pendeketan deskriptif yang menggunakan data kualitatif, yakni peneliti mengupayakan menemukan fakta yang ada dan peneliti juga menyesuaikan dengan lingkungan penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti secara jelas mencakup suatu fenomena sosial yang menerangkan data-data yang diperoleh oleh peneliti yang ada di lingkungan masyarakat.[42]

Kegiatan ini meliputi beberapa hal yang diawali dengan pengumpulan data, interpreasi data dan bagian akhir data disusun dan dijadikan suatu kesimpulan yang berpedoman kepada analisa data. Dari hal tersebut data itu tidak mencakup angka-angka, akan tetapi mencakup pada rangkaian kata-kata, dan penelitian yang dilakukan

[42] Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Yogyakarta: Andi Offset 1995), hal 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh peneliti dilaksanakan pada suatu masalah di lapangan yang berguna untuk mendapatkan data yang relevan.[43]

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal tersebut peneliti mempunyai alasan memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian, dikarenakan pasar waru merupakan salah satu pasar tradisional yang mempunyai problematika dalam penatannya yang dimana hal tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan dalam penelitian peneliti menjadwalkan penelitian berlangsung kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan November 2018 - Januari 2019.

3. Pemilihan Informan dan Pemilihan Obyek Penelitian

a. Informan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memilih informan penelitian yang dimana infroma penelitian merupakan seserorang yang menjadi sumber utama yang bisa memberikan data yang relevan dengan problematika yang hendak diteliti oleh peneliti.[44] oleh karena itu, penelitian ini sumber informasi adalah informan dan data serta masukan dalam menjawab penelitian. Oleh karena itu peneliti menentukan infroman pertama atau infroman kunci yang relevan dengan problematika yang diteliti yakni, Dinas Perindustiran dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Setelah dari informan kunci ini

[43] Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000),hal 36.

[44] Tatag Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta : Raja Grafindo, 1988), hal 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian peneliti akan wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan problematika pasar waru yakni, Paguyupan Pedagang "Maju Bersama" Pasar Waru.

b. Obyek Penelitian

Adapun objek penelitian ini, adalah :

a) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

b) Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

4. Tahap-Tahap Penelitian

a. Pra Lapangan

Tahap Pralapangan, tahap ini terdapat lima tahapan yakni : Pertama, peneliti merumuskan Rancangan Penelitian yang mana rancangan suatu penelitian kualitatif/usulan penelitian berisi : a). latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan pokok, b). Kajian Kepustakaan yang menghasilkan pokok-pokok, c). Pemilihan alat penelitian, d). Rancangan pengumpulan data, e). Rancangan prosedur analisis data, f). Rancangan perlengkapan yang diperlukan dalam penelitian, g). Rancangan pengecekan kebenaran data.[45]

[45] Lexy J.Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT. Remaja,2006), hal 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, peneliti melakukan pemeilihan lapangan penelitian dalam hal tersebut Memilih lapangan penelitian yang wajib dipertimbangkan oleh peneliti untuk melakukan pemilihan lokasi lapangan penelitian. Misalkan saja mempertimbangkan keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga ketika melakukan penelitian di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.[46]

Ketiga, memilah dan melihat kondisi lapangan. Dalam hal tersebut dilaksanakan guna agar peneliti mengetahui semua komponen lingkungan, seperti fisuk, sosial dan kondisi alam di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Dan hal tersebut membuat peneliti mampu mempersiapkan diri, fisik , maupun mental , dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan.[47]

Keempat, peneliti mempersiapkan perlengkapan penelitian, yang mana bukan hanya mempersiapkan fisik akan tetapi juga mempersiapkan segala sesuatunya yakni perlengkapan yang diperlukan, misalkan : alat tulis ,buku catatan,map , klip, dan lain-lain. Selanjutnya peneliti mempersiapkan alat perekam suara dan kamera foto serta peneliti wajib mempersiapkan jadwal yang meliputi waktu kegiatan.[48]

[46] Ibid, hal 86.
[47] Ibid hal 88.
[48] Ibid hal 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahap Pekerjaan lapangan

Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagaian,yakni :

Pertama, peneliti harus mengerti akan latar penelitian dan Persiapan diri yang diperlukannya strategi untuk turunnya peneliti dalam latar terbuka dan tertutup. Untuk latar terbuka apabila peneliti berada di lapangan umum seperti taman, warung, dan lain-lain. Pada latar tersebut peneliti hanya akan mengandalkan pengamatan dan kurang sekali untuk melaksanakan wawancara. Dalam hal tersebut peneliti harus memperhitungkan latar sehingga pengumpulan datanya menjadi efektif. Sementara itu pada latar terbuka peneliti harus akrab dengan informan hal tersebut dikarenakan latar pada latar tertutup perlu diaamati secara teliti dan wawancara secara mendalam.

Kedua, memasuki lapangan. Dalam hal ini a). peneliti perlu akrab dengan informan hal tersebut karena seolah-olah antara peneliti dan infroman tidak ada dinding pemisah, yang kemudian informan akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari peneliti. b). Peneliti juga harus mempelajari bahasa, hal ini wajib dilaksanakan oleh peneliti untuk menimalisir terjadi salah paham Peneliti hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Informan. c). Peneliti harus ikut serta, dalam hal ini peneliti harus terjun ke langsung dalam penelitian.[49]

[49] Ibid, hal 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, berperan serta mengumpulkan data. Peneliti harus ikut serta dalam lokasi penelitian yang baik. Dalam tahap ini peneliti mengunjungi tempat infroman yang akan diteliti, hal ini bertujuan guna informan senang hati dan relax untuk menjawab suatu pertanyaan oleh peneliti yang mengenai Problematika Implementasi Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan kunci utama yang berada di suatu penelitian, karena benar tidaknya suatu data tergantung kepada teknik pengumpulan data, yang nanti akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Teknik pengumpulan data guna untuk mengungkap suatu fakta yang mencakup variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. dan adapun data yang nanti didapatkan oleh peneliti, adalah : Rekaman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dokumentasi foto, serta catatan yang sudah ditulis oleh peneliti waktu mewawancarai informan.

Dan adapaun metode atau teknik pengumpulan yang digunakan di penelitian ini merupakan teknik analisis data dengan menggunakan triangulasi, yakni teknik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan diri dari berbagai teknik pengumpulan data san sumber data yang sudah ada. Dan Triangulasi sendiri, mencakup :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi dipakai untuk menjabarkan data penelitian yang melalui pengamatan melalui metode ini, peneliti melihat masalah yang relevan dengan pokok pembahasan yang diambil oleh peneliti. Observasi juga dilakukan oleh peneliti untuk melihat langsung bagaimana Pemerintah mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Maka peneliti mengamati tentang 1). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.2). Problematika yang ada saat dilakukannya penataan pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui bertemu dengan dua pihak orang guna untuk saling memberikan informasi dan gagasanya dengan tanya jawab dalam suatu tema. [50]

Dalam pemakaian wawancara penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengerti akan hal-hal dari subyek data yang lebih mendalam, hal ini dilakukan dengan cara peneliti sendiri wajib turun ke lapangan langsung dengan mendatangi tempat informan lalu peneliti memberikan pertanyaan kepada informan kemudian informan memberi jawaban dan setelah itu hasil wawancara yang di dapat

[50] Ibid, Hlm 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan dan dijabarkan secara rinci oleh peneliti. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi yang orisinil atau fakta yang ada di lapangan berkenaan dengan Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi kasus pasar Waru Kabupaten Sidoarjo).Wawancara tersebut ditujukan kepada :

1) Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sidoarjo
2) Ketua Paguyuban Pedagang "Maju Bersama" Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo
3) Pedagang Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan menyatukan data dengan mengambil data dari dokumen, mauapun catatan-catatan yang selaras dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.[51]

Pemakaian dokumentasi dalam penelitian ini guna memdapatkan kevalidan data serta mengukur layak tidaknya suatu data yang berguna untuk mengetahui efesiensi. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip Pedagang Pasar Waru dan Dinas Perindustrian dan Perdgangan Kabupaten Sidoarjo , yang berupa catatan- catatan yang tertulis pada buku peneliti, transkip, buku, surat, majalah dan sebagainya.

[51] Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),Hlm 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Penentuan Informan

Dan teknik penentuan informan di dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik yang dimana pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu atau bisa dikatan seseroang yang benar-benar dipilih karena memiliki karakteristik sebagai sampel. Dalam hal ini informan digunakan guna mengetahui suatu keadaan yang relevan dengan problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang (studi kasus pasar waru Kabupaten Sidoarjo). Maka dari itu informan yang dipilih oleh peneliti wajib memenuhi persyaratan, dan peneliti mengambil informan :

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Jabatan
1	Joko	Kasi Disperindag
2	Bapak Piin	Ketua Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” Pasar Waru
3	Juanna	DPRD
4	Lipah	Pedagang Pasar Waru
5	Tohari	Pedagang Pasar Waru
6	Mat	Pedagang Pasar Waru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis data yang sudah didapat pada saat wawancara, menurut wiles dan Huberman mengatakan kegiatan pada analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai selesai, yang kemudian data yang diperoleh datanya jenuh. Kegiatan yang berupa analisis data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification.[52] Yang dimana teknik analisis ini dapat disatukan atau dikatiktan dengan teori, yang kemudian mendapatkan suatu jawaban yang bisa menyelesaikan masalah yang diteliti oleh peneliti.[53] dari hal tersebut memiliki tiga aspek yang dimana aspek tersebut terlibat di dalam proses analisis yang juga berhubungan untuk menentukan hasil akhir dari suatu analisis data. Tiga aspek tersebut meliputi :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang sudah didapatkan oleh peneliti di lapangan berjumlah sangat banyak, oleh karena itu peneliti harus mencatat dengan teliti dan secara rinci. Dan reduksi data merupakan data dirangkum dan juga data dipilah untuk menemukan poin-poin penting, serta peneliti berfokus pada tema dan pola serta memilah data yang tidak perlu. Dan kemudian peenliti menyusun data agar peneliti mendapatkan kesimpulan.

[52] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfaveta, 2013), Hlm 247.

[53] Soerjono,Soekanto, pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1996), hal 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka kemudian peneliti mendiplaykan data yang dimana peneliti menyajikan data yang dilaksanakan dalam bentuk serangkaian kata yang singkat, lalu bisa diberikan bagan, serta hubungan antar kategori yakni flowchart maupun lainnya. Di sisi lain peneliti dapat menggunakan sajian data yang berupa gambar, skema maupun matriks, dan menggunakan narasi kalimat.

Melalui penyajian data tersebut, maka data yang sudah tertata dalam pola hubungan, sehingga peneliti semakin mudah untuk memahami. Dalam mendisplay data, maka akan mudah untuk mengerti apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dimengerti.

c. *Conclusion Drawing*/ Verifikasi Data

Tahap selanjutnya yakni langkah ketiga, yang dimana analisis tersebut merupakan suatu raangkaian kesimpulan dan verifikasi. Yang dimana pada awal kseimpulan yang akan dijelaskan hanya bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tak ditemuka bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Namun apabila kesimpulan yang dijelaskan di tahapan awal seharusnya dengan bukti yang valid ataupun konsisten pada waktu peneliti ke lapangan lagi untuk mengumpulkan data, dan dari itu kesimpulan dapat kredibel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data guna pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan dari sejumlah kriteria tertentu. Hal itu ada empat yang digunakan , yakni : derajat Kepercayaan *(credibility)*, Keteralihan *(Tranferability)*, Kebergantungan *(Dependability)*, dan Kepastian *(Confirmability).*

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini memakai teknik analisis data yang telah dipaparkan oleh Miles dan Huberman, yang dimana ia mengatakan data yang sudah terkumpul hendaknya dibuat dalam matriks. Dan matriks itu hendak disaujkan uraian data deskriptid yang berpedoman pada kejadian maupun pengalaman yang selanjutnya akan di cek terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam matriks.[54]

Analisis data dilakukan oleh peneliti sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis data yang harus dirumuskan oleh peneliti adalah : merumuskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai hasil penelitian.[55] Dan dalam analisis data juga dilakukan pada saat pengumpulan data. Waktu wawancara peneliti harus sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang akan diwawancarakan. Apabila jawaban

[54] Miles, Matthew B Miles dan A. Michael Huberman. Analisis data Kualitatif buku sumber tentang metode-metode Baru. Terjemahan Tetjep Rohendi Rohisi. (Jakarta: Universitas Indonesia 2007) hal 139.

[55] Sugiyono, memahami penelitian kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2005) hal 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari informan kurang memuaskan bagi peneliti, maka peneliti harus wawancara kembali untuk mendapatkan jawaban yang kredibel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Setting Penelitian

Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Titik koordinat sidoarjo terletak diantara 112,5 sampai 112,9° BT. Kota sidoarjo terletak digaris khatulistiwa yang menjadikan Kabupaten Sidoarjo mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Bulan Meui sampai denga September adalah musim kemarau, dan bulan Oktober sampai bulan april adalah musim Hujan.[59]

Kabupaten Sidoarjo mempunyai peluang ekonomi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah daerah yang terletak dipinggiran kota Surabaya kea rah selatan. Kabupaten sidoarjo terletak di perbatasan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Yang dimana pintu gerbang Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dihubungkan melalui jalan raya kelas 1. Khusunya Kabupaten malang, pasuruan, dan mojokerto. Jika hendak ke Surabaya harus melewati Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi yang seperti ini dapat menjadikan peluang besar untuk Kbupaten Sidoarjo menjadikan lebih berkembang dan maju. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo bisa menarik dampak yang positif dengan adanya hubungan melalui kemajuan akses bilitas yang telah didukung oleh fasilitas sarana, prasarana komunikasi, transportasi, dan juga suumber daya manusia yang mumpuni. Dari 18 Kecamatan di kabupaten Sidoarjo

[59] www.sidoarjokab.go.id (Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 09.00 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan waru merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki peluang ekonomi strategis.[60]

Waru merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya yaitu di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kecamatan Waru berada di sebelah utara Kabupaten Sidoarjo, yang jaraknya kurang lebih 17 km dari pusat Kabupaten Sidoarjo. Disebabkan letaknya yang berbatasan dengan Surabaya hal ini menyebabkan budaya masyarakat Waru bisa dibilang majemuk dan diiringi tingkat mobilitas yang tinggi.[61]

1. **Luas Wilayah**

   Luas Wilayah Kecamatan Waru adalah 3.032 Hektare dengan ketibggian rata-rata 5m dpl, di mana sebagaian besar merupakan tanah kering (2450,67 Ha) dan tanah sawah seluas 581,58 Ha. Kecamatan Waru terdiri dari 17 Desa dengan klasifikasi Desa Swasembada yang mempunyai 144 Rukun Warga dan 767 Rukun Tetangga.

2. **Batas-Batas Wilayah :**

   Seblah Utara : Kota Surabaya

   Sebelah Timur : Kecamatan Sedati

   Sebelah Barat : Kecamatan Taman

   Sebelah Selatan : Kecamatan Gedangan

[60] https://id.m.wikipedia.org
[61] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya pelayanan prima yang harmonis dan terpadu.

Misi : Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan.

4. Kondisi Administratif

Kondisi Administratif Kecamatan Waru yang dipimpin oleh seorang Camat yang dimana Camat tersebut menyelenggarakan dan melaksanakan urusan Pemerintahan dan kewenangan. Kewenangan Camat yang diberikan Bupati adalah untuk menangani Otonomi Daerah dengan mengkoordinir desa-desa yang berada di wilayahnya yang dibantu oleh anggota Muspika, dan Kapolsek. Secara administratif Waru adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai desa paling sedikit, yakni 17 Desa dengan 48 Dusun. Dan tiap Desa terdiri 2 samopai 3 Dusun. Kecamatan Waru juga memiliki 148 Rukun Warga dan 769 Rukun tetangga serta 70.299 Kepala Keluarga.[62]

5. Sarana dan Prasarana

Dalam Sarana fisik di Kecamatan Waru adalah pendidikan, pendidikan di Kecamatan waru sebagai penunjang utama dalam proses belajar mengajar dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian adanya pendidikan

[62] www.kecmatanwarukab.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prasekolah yang mulai muncul di Kecamatan waru yakni pendidikan anak usia dini (PAUD) serta Taman Kanak-Kanak (TK).[63]

Tidak hanya Sarana Pendidikan tetapi Kecamatan Waru juga memiliki Sarana Pendidikan yang dimana Kecamatan Waru memiliki dua Puskesmas yakni Puskesmas Medaeng dan Puskesmas Waru. Hal ini dapat meningkatkan layananan Kesehatan bagi penduduk di Kecamatan Waru.

6. Jumlah Penduduk Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Jumlah penduduk di Kecamatan Waru pada tahun 2016 yang berdasarkan dalam Kecamatan Waru angka 2017 berjumlah 214.306 jiwa yang terdiri laki-laki 105.053 Jiwa dan Perempuan 109.253 Jiwa. Yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah penduduk Kecamatan Waru tahun 2016

Desa / Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Medaeng	6.622	6.718	13.340
Pepelegi	7.880	8.199	16.079
Waru	4.946	5.141	10.087
Kureksari	7.999	7.833	15.832
Ngingas	6.474	6.480	12.954

[63] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tropodo	11.224	11.818	23.042
Tambak Sawah	4.372	6.999	11.371
Tambak Rejo	8.799	8.604	17.403
Tambak Oso	1.495	1.464	2.959
Tambak Sumur	4.839	4.861	9.700
Wadung Asri	4.607	4.653	9.260
Berbek	4.497	5.009	9.956
Kepuh Kiriman	8.413	8.405	16.818
Wedoro	7.211	7.270	14.481
Janti	3.311	2.460	5.771
Kedung Rejo	7.490	9.246	16.736
Bungurasih	4.424	4.093	8.517
Jumlah	105.053	109.253	214.306

Sumber : kecamatan waru dalam angka 2017.[64]

7. Perekonomian Kecamatan waru

Kecamatan waru yang memiliki pengembangan ekonomi regional tersendiri yakni dengan adanya kawasan industri utama di Selatan Surabaya. Banyak sentra Industri di Kecamatan Waru ini, mulai logam yang berada di Desa Ngingas serta Seoatu atau sandal

[64] Kecamatan waru dalam angka 2017, dikutip pada tanggal 3 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada di desa Wadung Asri berbek, Kepuh Kiriman,Wedoro. Desa Berbek yang secara administratif yang berada di Kecamatan Waru juga sebagai pusat Industri Rungkut (SIER) yang kemudian dikenal dengan Kawasan Industri Berbek.

Kecamatan Waru dikenal juga sebagai pusat Industri Penyangga dari Kota Surabaya , karena banyak Indutsri penting yang sebelumnya berpusat di Kota Surabaya berpindah ke Kecamatan Waru. Misalnya saja Pabrik Paku, Pabrik Susu Nestle, Perusahaan biskuit UBM dan Perusahaan baja terbesar di Dunia yakni Ispat Indo. Kecamatan Waru juga memiliki pasar yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.[65] Pasar Waru merupakan pasar tradisional yang dikenal sangat murah diantara pasar-pasar lainnya. Pasar waru sendiri menjadi dua bagaian yakni pasar waru baru dan pasar waru lama.

Pasar Waru lama yang terletak di Kedungrejo Timur yang berada di pemukiman warga dan memiliki jumlah pedagang 276 Pedagang. Sedangkan pasar waru baru yang bertempat di Kedung Rejo tepatnya depan pabrik paku yang berjumlah 111 Pedagang dari jumlah kios dan los 770.

[65]https://id.m.wikipedia.org/wiki/waru_Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2

Jumlah Pedagang berdasarkan Jenis Dagangannya

NO	Jenis Dagangan	Jumlah Anggota
1	Bumbu	29
2	Ayam	29
3	Pentol	1
4	Tahu Tempe	22
5	Minyak	1
6	Buah	19
7	Gorengan	3
8	Kelapa	9
9	Bunga	1
10	Sayur	49
11	Ikan	37
12	Peralatan Rumah Tangga	25
13	Daging	11
14	Kopi	2
15	Cecek	6
16	Makanan	14
17	Kue	19
	Jumlah Pedagang	276 Pedagang

Sumber : Paguyuban Pedagang "Maju Bersama".[66]

Paguyuban Pedagang yang berjumlah 276 pedagang ini mengklaim bahwa mereka semua tidak mendapatkan stand di pasar Kedungrejo sebab semua stand yang di pasar waru baru sudah terjual.

[66] Bapak Piin selaku Ketua Paguyuban Pedagang " Maju Bersama", wawancara pada tanggal 17 Desember, pukul 16.55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.3

Jumlah Pedagang di Pasar Waru baru

Jumlah Kios dan Los	Stand yang buka	Stand yang tutup
770 stand	111 Pedagang	659 Pedagang

` Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan.[67]

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari jumlah kios yang ada di pasar waru baru yang berjumlah 770 stand, stand yang buka hanya 111 pedagang dan stand yang tutup 659.

B. Deskripsi Data

Deskripsi hasil penelitian berisi pembahasan tentang Implementasi dan Problematika Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

1. Implementasi Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

   Alasan Pemerintah Kabupaten untuk menata pasar adalah berdasarkan atas alasan tata ruang kota dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah Kabupaten beranggapan bahwa letak pasar waru lama berada di jalur rel kereta api yang bisa saja membahayakan masyarakat sendiri. Bukan hanya itu, daerah pasar waru lama sendiri merupakan salah satu daerah yang terdampak pembangunan frontage.

[67] Joko selaku Kasi Disperindag ,wawancara, pada tanggal 13 Desember 2018, pukul 12.30 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sesi wawancara ke Bapak Joko selaku Kasi Pasar beliau mengatakan bahwa :

> "pemindahan pasar waru lama yang dilakukan oleh Pemerintah akan digunakan frontage timur yang akan dibangun pada tahun 2019 frontage tersebut kelanjutan dari frontage utara."[68]

Dalam Proses pemindahan pasar waru lama ke daerah Pasar waru baru Pemerintah atau Implementator sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar sebagai objek penataan secara berkelanjutan. Bapak Joko selaku Kasi Pasar di Desperindag beliau mengatakan :

> "bahwa pemindahan pasar waru lama sudah dilakukan sosialiasasi berkali-kal, mulai dari perencanaan, mulai pembangunan, sampai pada pemindahan. Sosialisasi sudah dilakukan oleh kami tidak hanya sosialiasi tetapi juga mengelompokkan komoditas para pedagang."[69]

Peneliti juga mewawancarai pedagang pasar waru lama dan ketua Pagyuyuban Pedagang Maju Bersama yang mengatakan :

> " iya dulu mbak memang ada sosialisasi hanya dimintai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk di data dan untuk memiliki buku tanda hak kepemilikan stand"[70]

Dari pernyaataan yang disampaikan pihak dinas perindustrian dan perdagangan sedikit ada perbedaan yakni Pihak dari dinas perindustrian dan perdagangan mengatakan jika sudah dilakukan berulang kali melakukan sosialisasi mengenai pemindahan pedagang pasar waru lama ke pasar waru baru, tetapi pedagang pasar waru lama

---

[68] Bapak Joko Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Wawancara, pada tanggal 13 Desember, pukul 12.30 WIB.

[69] Ibid

[70] Pedagang Pasar waru lama dan Ketua Paguyuban Pedagang "Maju Bersama",wawancara, pada tanggal 3 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan jika hanya ada sosialisasi sekali saja, itupun hanya dimitai memenuhi persyaratan yang digunakan untuk pemindahan stand ke pasar waru baru.

Dan pedagang pada waktu sosialisasi awalnya menerima kebijakan tersebut namun akan tetapi pada akhirnya mereka kembali lagi ke pasar waru lama. Seperti yang dikatakan Bapak Joko selaku Kasi Dinas perindustrian dan Perdagangan :

> "pada saat sosialisasi semua pedagang pasar waru untuk pemindahan bilangnya iya-iya, iya memang mereka pertamanya membeli stand di pasar waru akan tetapi pada akhirnya mereka kembali lagi membuka lapak di pasar waru lama dengan meninggalkan stand yang berada pasar waru baru"

Dalam Pemindahan Pasar waru lama terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pedagang Pasar yakni dengan memiliki Buku tanda hak milik Stand, dengan menyerahkan Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan diserahkan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan akan diberikan Buku tanda hak milik Stand kepada pedagang. Dengan bukti tersebut maka, pedagang pasar waru lama punya hak untuk menempati stand pasar waru baru. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Joko selaku kasi Disperindag yakni :

> "Pedagang pasar waru lama membayar retribusi dengan harga los = 500.000 dan harga kios = 1.250.000, kemudian setelah 3 tahun pemakaian harus memperpanjang kepemilikan stand dengan harga los = 60.000 rupiah dan kios = 80.000 rupiah disertai dengan membawa buku tanda hak milik stand. Pedagang harus memperpanjang kepemilikan stand kepada pihak Dinas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Perindustrian dan Perdagangan dengan durasi yang telah ditetapkan”[71]

Hal serupa dikatan oleh Pedagang Pasar Waru lama yang memiliki stand di pasar waru baru yakni Bu Lipah, Bapak Tohari dan Bapak Mat :

> “Saya membeli dengan harga 1250.000 karena saya membeli kios mbak, tapi ya gitu disana tidak ditempati kosong karena saya berjualan disini (pasar waru lama).”

Namun dalam pengimplementasiannya penataan stand dan Penempatan Pedagang masih belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan pihak Dinas yang tidak memprioritaskan pedagang pasar waru lama untuk diberikan jatah stand. Dalam hal ini peneliti mewawancari Bapak Piin Ketua Paguyuban Pedagang Pasar “Maju Bersama” , yang mengatakan bahwa:

> “Pada saat dimintai KTP dan KK bilangnya dipindahkan ke pasar waru baru tetapi tahu-tahunya pedagang pasar waru lama banyak yang tidak dapat stand, karena stand diperjual belikan ke pihak luar dengan harga Rp 10.000.000 untuk los dan 12.000.000-60.000.000 untuk kios”[72]

Para pedagang yang akan membeli stand di pasar waru baru dimintai beberapa surat untuk memenuhi kelengkapan untuk membel stand tersebut. Tetapi pada akhirnya pembagian stand di pasar waru baru tidak merata. Pedagang yang seharusnya mendapat stand di pasar waru baru tidak mendapatkannya.

Pembagaian stand yang tidak merata tersebut akkibat diperjual belikannya stand yang ada di pasar waru baru. Stand yang ada di pasar

[71] Ibid

[72] Bapak Piin selaku Ketua Paguyuban Pedagang “ Maju Bersama”, Hasil wawancara, pada tanggal 17 Desember pukul 16.55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waru baru tersebut memang diprioitaskan terlebih dahulu untuk pedagang pasar waru lama yang ingin pindah ke pasar waru baru. Namun hal itu terhalang karena adanya keganjalan dalam pembagian stand yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Problematika Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dari berbagai prosedur yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten masih terdapat banyak kekurangan atau problematika yang ada. Dari wawancara terhadap pedagang pasar waru sebenarnya mereka merasa keberatan dengan adanya pemindahan pasar waru tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya :

Pertama, karena Pemerintah tidak memprioritaskan atau tidak adanya pemerataan dalam penjualan stand dalam artian Pemerintah malah menjual stand kepada pihak luar. Dalam hal ini peneliti mewawancari Bapak Piin Ketua Paguyuban Pedagang Pasar "Maju Bersama" , yang mengatakan bahwa:

> "Pada saat dimintai KTP dan KK bilangnya dipindahkan ke pasar waru baru tetapi tahu-tahunya pedagang pasar waru lama banyak yang tidak dapat stand, karena stand diperjual belikan ke pihak luar dengan harga Rp 10.000.000 untuk los dan 12.000.000-60.000.000 untuk kios"[73]

[73] Bapak Piin selaku Ketua Paguyuban Pedagang " Maju Bersama", wawancara, pada tanggal 17 Desember pukul 16.55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya Pak Piin selaku Ketua Paguyuban Pedagang "Maju Bersama", akan tetapi Bu juanna selaku DPRD Sidoarjo mengatakan bahwa :

> "Tidak adanya pemerataan penjualan stand, seharusnya yang diprioritaskan adalah pedagang pasar waru lama yang akan di relokasi tapi pada realitanya stand diperjual belikan kepada pihak luar. Dan seharusnya apabila memang benar-benar dipindahkan stan yang diberikan ke pedagang diberikan secara gratis, mungkin pedagang hanya membayar retribusi saja perbulan."[74]

Akan tetapi yang dikatakan Bapak Joko selaku Kasi Disperindag, yakni :

> "Pedagang pasar waru lama keseluruhan sudah memiliki stand, memrioritaskan pedagang pasar waru terlebih dahulu baru kemudian menjualnya di pihak luar dan pihak luar itu adalah pedagang yang berjualan dirumahnya sendiri di sekitar pasar waru lama"[75]

Dengan tidak meratanya pembelian stand dan penempatan pedagang, paguyuban pedagang maju bersama sudah mengupayakan untuk mengurus suapaya para pedagang mendapatkan stand, hal ini dikatakan oleh Bapak Piin selaku Ketua Paguyuban Pedagang "Maju Bersama"

> "padahal saya sudah bolak balik untuk mengurus biar pedagang mendapatkan stand, tetapi tetep saja tidak bisa soalnya standnya sudah habis, saya 2 kali mengurusnya tapi ya percuma tidak dapat jatah stand".

Kedua, Pedagang pasar waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru kembali lagi ke pasar waru lama karena di Pasar Waru Baru sepi Pelanggan, secara letak pasar waru baru itu dekat dengan Pabrik Paku dan dinilai kurang strategis karena pembeli atau

[74] Ibu Juanna selaku DPRD Sidoarjo,wawancara, pada tanggal 15 Desember 2018, pukul 14.00 WIB.

[75] Bapak Joko selaku Kasi Diperindag,wawancara, pada tanggal 13 Desember, pukul 12.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggan yang ingin ke pasar waru baru apabila dari arah Sidoarjo kota pembeli harus putar balik terlebih dahulu ke Bundaran Cito dan untuk pembeli yang jalan kaki mereka harus menyebrangi jembatan penyebrangan lalu jarak ke pasar waru baru jalan kakinya cukup jauh. Hal ini dirasakan oleh pedagang pasar waru baru yang pindah ke pasar waru lama, dan seperti yang dikatakan oleh para pedagang pasar waru lama Bapak Tohari, Bapak Mat dan Ibu Lipah,yakni :

> "Di pasar waru baru sepi, pelanggannya di pasar waru lama semua, karena pelanggan juga lebih memilih ke pasar waru lama karena jangkaunnya sangat dekat dibanding harus ke pasar waru baru atau pasar kedung rejo"[76]

Tidak hanya pedagang pasar waru, Ketua Paguyuban pedagang Maju Bersama mengatakan :

> "karena pasar waru baru cukup jauh dan pelanggan harus putar terlebih dahulu apalagi kalau disana sepi,intinnya kurang efektif tempatnya. Karena pembeli atau tengkulak di pasar waru lama itu lebih banyak dari jauh mbak, seperti gedangan, taman. Mangkanya mereka lebih baik beli di pasar waru lama dibanding ke pasar waru baru"[77]

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan pelanggan lebih memilih ke pasar waru lama karena mereka lebih memilih dekatnya dan apabila pelanggan akan membeli atau memasok di pasar waru baru mereka harus berputar terlebih dahulu dan sangat jauh. Dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap Pemerintah, seperti yang dikatakan Bapak Joko selaku Kasi Disperindag :

---

[76] Pedagang Pasar waru lama Bapak Tohari, wawancara, Bapak Mat dan Ibu Lipah pada tanggal 3 Desember.

[77] Bapak Piin selaku Ketua Paguyuban Pedagang " Maju Bersama",wawancara, pada tanggal 17 Desember pukul 16.55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Problematika yang ada saat ini yakni, pedagang pasar waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru tidak berjualan di pasar waru lama dan stand di pasar waru baru tidak ditempati. Pihak Pemerintah merasa dirugikan karena timpangnya pengeluaran dan pemasukan dalam PAD yang digunakan untuk perawatan fisik di pasar waru baru."

Ketiga, harus bayar parkir apabila masuk ke pasar waru baru, tidak seperti di pasar waru lama di pasar waru baru pembeli atau pedagang yang mau memasuki kawasan pasar waru lama tidak perlu mengeluarkan biaya untuk parkir akan tetapi hal ini berbeda di pasar waru baru harus membayar parkir sebesar Rp 2000 rupiah. Seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Lipah selaku Pedagang pasar waru lama yang mempunyai stand di pasar waru baru, mengatakan bahwa :

> " apabila masuk ke pasar waru baru harus bayar parkir terus berbeda dengan pasar waru lama yang tidak dipungut biaya parkir, masak kalau keluar terus masuk lagi bayar, keluar masuk lagi bayar ya jadi malas mbak"[78]

Dalam hal penolakan yang menjadi problematika cukup serius, Pemerintah belum melakukan tindakan yang cukup tegas sama sekali, hanya sekedar himbauan saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Joko selaku Kasi Disperindag :

> "Sudah sering dihimbau berulang kali untuk pindah ke pasar waru baru, bahkan kami meminta bantuan kepada politisi untuk minta tolong agar pedagang pasar waru lama berpindah dari pasar tersebut, contohnya saja pada pemilihan lurah kami minta bantuan untuk pindah. Tidak hanya itu yang menjadi masalah juga adalah pihak lingkungan atau RT dan RW yang masih menginzikan tempat tersebut untuk berjualan serta paguyuban sendiri pun juga memihak ke pedagang pasar waru lama."

[78] Ibu Lipah selaku pedagang pasar waru lama ,wawancara,pada tanggal 3 Desember2018, pukul 11.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang yang sudah dihimbau beberapa kali oleh pihak Pemerintah dirasa tidak membuat Pedagang pasar waru jera, karena dalam hal tersebut adanya pihak lingkungan yang mendukung adanya aktivitas pasar di tempat tersebut. Dalam adanya problematika tersebut dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan frontage, seperti yang dikatakan oleh Bapak Joko selaku Kasi Didpserindag :[79]

> "Pada tahun 2018 itu pembebasan untuk pembangunan frontage, dan pada tahun 2019 mulai dibangun frontage. Namun sampai saat ini di daerah pasar waru masih belum adanya pembebasan, hal ini yang menghambat pembangunan dan hanya daerah pasar waru saja yang belum terbebaskan."

Terhambatnya pembangunan frontage road yang hanya terjadi pasar waru membuat pemerintah resah karena masih banyaknya problematika yang ada, dari hal tersebut Pemerintah belum menindak tegas agar pemindahan pedagang pasar waru segera tertata dan tidak menghambat akses. Dan apabila diadakannya kembali penataan secara merata maka, pihak Ketua Paguyuban mengatakan :[80]

> "iya tidak apa-apa, saya malah suka apabila pasar waru lama ini ditata kembali karena saya sudah capek ngurusin pasar waru lama , tapi kalau mau ditata ya mau ditata gimana lagi wong pasarnya aja tempatnya di pemukiman warga terus juga pedagang sini banyak orang madura yang sulit ditatanya. Kalau memang pedagang mau dipindahkan ya saya mendukung"

[79] Bapak Joko selaku Kasi Diperindag,wawancara, pada tanggal 13 Desember, pukul 12.30 WIB.

[80] Bapak Piin selaku Ketua Paguyuban Pedagang " Maju Bersama",wawancara, pada tanggal 17 Desember pukul 16.55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti juga wawancara kepada pedagang pasar waru, yakni Ibu Lipah, Bapak Tohari, dan Pak Mat yang mengatakan :

> " iya kalau semisal ditata kembali saya mengikuti pedagang yang lainnya apabila pedagang lainnya ikut pindah saya pun juga pindah begitupun sebaliknya, dan kalau memang ditata kembali pemerintah bisa mengatasi masalah pelanggan"[81]

Kalau memang pasar waru lama akan ditata kembali Pemerintah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah lainnya tidak hanya masalah Pemerintah ingin membuat frontage tapi pedagang juga harus dipikirkan karena menjadi padang merupakan sumber utama ekonomi mereka untuk menghidupi keluarganya.

C. Analisis Data

Kebijakan mengenai penataan pasar Tradisional sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh koperasi, swasta, BUMN maupun BUMD. Dalam pasal ini juga diatur bagaimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan daya saing pasar Tradisional dengan cara peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional maupun fasilitasi proses pembiayaan kepada pedagang pasar guna modal kerja atau kredit kepemilikan tempat usaha.

Dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha menjabarkan peraturan itu dengan

[81] Pedagang pasar waru lama ,wawancara,pada tanggal 3 Desember2018, pukul 11.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2011 tentang Penataan stand dan penempatan pedagang Pasar Waru. Namun dalam implementasinya peraturan Bupati ini kurang maksimal dan terkesan jalan ditempat. Maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati no 22 tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu sasaran dari penerapan Peraturan Bupati ini adalah Pasar Waru. Sejak tahun 2011, Pemerintah Sidoarjo sudah berusaha untuk menata Pedagang Pasar Waru lama ditempat yang lebih layak yakni, pasar waru baru yang berada di Kedung Rejo. Pasar Waru Baru yang sudah disediakan terdapat fasilitas yang mendukung yakni dengan adanya parkir mobil, motor, sepeda dan lai-lain. Selain itu juga Pedagang akan dikelompokkan berdasarkan komoditas yang hendak di jual, mulai dari lapak sayuran, ikan basah, prancangan, konveksi maupaun tahu dan tempe. Dengan adanya fasilitas ini diharap pedagang dan pelanggan dapat memanfaatkannya dengan baik.

1. Implementasi Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

   Pelaku kebijakan, Lingkungan Kebijakan, dan kebijakan publik yang dikeluarkan itu merupakan suatu yang saling berkaitan. Hal itu menunjukan bahwa keberhasilan implementasi tidak terlepas dari ketiga komponen tersebut. Karakteristik kebijakan yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sebagai target dari kebijakan. Maka jika ingin memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai pelaku, terkait dengan kebijakan publik maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan pemahaman bahwa untuk merealisasikanya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk melakukan pemahaman terkait implementasi peraturan bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar waru yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan pelaku kebijakan dengan tujuan utamanya adalah penataan tata ruang kota dan merevitalisasi pasar menjadi tempat yang layak.

Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai, untuk memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier implementasi kebijakan merupakan upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Berkaitan dengan topik penelitian implementasi peraturan bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar waru menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dalam teori Grindle Implementasi mempunyai Kriteria pengukuran, yakni :

Kriteria Pengukuran Implementasi menurut Grindle perlu adanya partisipasi dan kontribusi masyarakat yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar waru Kontribusi atau pasrtisipasi masyarakat yang dimaksud dalah para pedagang-pedagang pasar waru lama yang dimana mereka menolak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya penataan stand dan penempatan pedagang yang membuat kebijakan itu kurang maksimal.

Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif.

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Tidak hanya dari lingkungan masyarakat sekitar akan tetapi juga dari lingkungan sosial dan ekonomi yang dikemukakan Van Metter hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Kriteria pengukuran menurut grindle diawali dengan adanya kebijakan. Pasar waru yang dulunya tidak tertata memakan jalan serta sampai ada di pinggiran kereta api yang membuatnya sebagi daerah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rawan sekali, kumuhnya pasar tersebut, serta rencana adanya pembuatan frontage membuat pemerintah sidoarjo membuat peraturan bupati nomor 19 tahun 2011 tentang penataan stand dan penempatan pedagang pasar waru, lalu kebijakan tersebut di sempurnakan kembali di dalam peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang pasar daerah sidoarjo. Kriteria pengukuran juga dipengaruhi oleh kepatuhan implementator.

a. Kepatuhan Implementator

Lembaga yang dijadikan implementator dari peraturan tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tetapi pada proses pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal hal ini menyangkut kapatuhan Implementator terhadap Peraturan yang ada. Misalnya saja sosialisasi yang dilakukan selama beberapa tahun hanya dilakukan satu kali dengan dimintai KTP dan KK untuk memenuhi persyaratan memiliki stand, serta adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menjual stand yang seharusnya menjadi jatah pedagang pasar waru lama yang sudah terdaftar di database justru dijual ke pihak luar dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga yang seharusnya. Hal ini sangat berbeda dengan Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 yang menyatakan pedagang yang sudah terdaftar dalam database diberikan prioritas untuk mendapatkan stand.

Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan peraturan tersebut menjadikan penghambat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujudnya program pemerintah untuk menata pasar waru menjadi lebih tertata dari pada sebelumnya. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan jika lingkungan para pedagang dan pihak RT RW memberikan respon yang negatif. Hal itu dapat dilihat dari pedagang yang kembali lagi ke pasar waru lama padahal sudah memiliki stand di pasar waru baru serta pihak RT, RW dan Ketua Paguyuban Pedagang "Maju Bersama" memberikan dukungan kepada mereka untuk berjualan ditempat yang akan dibangun frontage. Seperti yang diakatakan oleh Grindle apabila lingkungan berpandangan negatif maka kebijakan tersebut tidak optimal dalam pelaksanannya, sama dengan penataan pasar waru yang merespon negatif sehingga kebijakan yang diperuntukkan baik ke masyarakat malah menjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan berjalan tidak semestinya dan kurang efektif.

b. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Waru

Kondisi sosial ekonomi pedagang pasar waru yang menyangkut akan hal keadaan pedagang pasar waru mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi dan kondisi sosialnya dikatakan masih belum bisa terbuka atau bisa dikatakan masih tertutup dan tradisional, hal ini membuat pedagang pasar waru tidak mudah untuk menerima kebijakan penataan stand dan penempatan pedagang sehingga menyebabkan pengimplementasiannya terhambat dan tidak berjalan secara efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Komuikasi antara Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan

Dalam Implementasi juga perlu adanya Komunikasi antar Organisasi yang terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksana yang dimana hal ini dijelaskan oleh Van Horn dan Van Mater yang dimana yang Pembuat Kebijakan berkomunikasi terhadap pelaksana atau Implementator dengan menjelaskan standar tujuan konsisten terhadap kebijakan penataan stand dan penempatan pedagang pasar, dengan hal tersebut para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh Pemerintah. Namun pada nyatanya Pemerintah belum maksimal dalam melaksanakan komunikasi terhadap pelaskana atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan kebijakan Penataan stand dan Penempatan Pedagang tidak melakukan dengan maksimal atau tidak berjalan sesuai Peraturan Penataan Stand dan Penempatan Pedagang.

2. Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melakukan kebijakan Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan pedagang, dimana Peraturan Bupati ini mengatur mengenai mekanisme pedagang sehingga diharapkan agar lebih mudah untuk diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan teori Implementasi kebijakan Grindle, teretak pada pemahamannya yang komperehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang meyangkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor.

a. Implementator

Implementator dari Penataan stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam hal ini Implementator sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan karena berhasil tidaknya suatu kebijakan dengan dilihat Implementator tersebut menjalankan sesuai dengan peraturan atau malah sebaliknya. Dalam hal ini Implementator kurang optimal dengan pelaksanannya ya memang implemantator yang pertamanya berpihak kepada pemerintah dengan melakukan sosialisasi serta memintai data kepada pedagang pasar waru, namun pada akhirnya keberpihakan tersebut luntur dengan adanya jual beli stand oleh pihak dinas ke pihak luar.

b. Penerima Implementasi

Dalam suatu kebijakan tidak hanya ada yang melaksanakan tetapi juga adanya penerima Implementasi yang dimana dalam penataan stand dan Penempatan Pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo penerima implementasinya adalah pedagang pasar waru sendiri. Dalam penataan ini pedagang selaku Implementator memang awalnya menerima adanya penataan stand dan penempatan pedagang, tetapi dengan seiring berjalannya waktu mereka merasakan di pasar waru baru sepi pelanggan, oleh karena itu pedagang pasar waru lama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mempunyai stand di pasar waru baru kembali lagi ke pasar waru lama.

c. Konflik Para Aktor

Dalam Penataan stand dan Penempatan Pedagang terdapat konflik para aktor yang dikarenakan dalam Pelaksanaan tersebut masih terdapat kendala yakni , aktor dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Pihak lingkungan yang dimana dari Pihak Dinas menginginkan Pedagang pasar waru lama untuk pindah ke pasar waru baru yang telah disediakan di JL. Brigjen katamso dekat pabrik paku akan tetapi dengan adanya penolakan dikarenakan kecewanya para pedagang pasar waru lama karena tidak adanya pemerataan saat pembagaian stand, sehingga mereka membuat paguyuban pedagang dan mereka tetap berjualan di pasar waru lama tidak hanya itu pihak lingkukan seperti RT, RW pun juga mendukung apabila pedagang tetap berjualan di pasar lama. Hal ini mengakibatkan konflik para aktor yang sampai saat ini belum terselesaikan yang berimas kepada kebijakan tata ruang kota dengan diadakannya pembangunan frontage road.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (dalam subarsono) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program sudah tepat. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. Namun implementasi tersebut masih mempunyai problematika atau kendala yang membuat Implementasi kurang efektif, dalam hal tersebut maka peneliti memberikan analisis dilihat dari isi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepentingan kelompok sasaran

   Sasaran atau target dari implementasi perbup nomor 22 tahun 2018 ini adalah pedagang di pasar waru lama melalui beberapa fenomena, yaitu: a. Kawasan pasar waru lama akan digunakan sebagai jalur frontage road untuk menghubungan kota surabaya dengan kabupaten sidoarjo; b. Pemindahan pasar waru sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dengan perlunya peremajaan pasar menjadi lebih inovatif; dan c. Sebagai implementasi dari program penataan kota.

   a. Keberpihakan implementasi perbup nomor 22 tahun 2018 kepada pasar waru pedagang

      Di dalam ketepatan kebijakan, perbup nomor 22 tahun 2018 ini dikatakan belum cukup baik dikarenakan dalam pengaplikasiannya pedagang di pasar waru belum merasakan dampak yang signifikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan pedagang terhadap di pasar waru diantaranya:

Pertama, Kondisi Pasar Waru baru yang sepi pembeli. Hal ini dikeluhkan oleh para pedagang pasar yang mengatakan bahwa pasar kedungrejo yang notabene menjadi lokasi pemindahan pedagang pasar waru ini kurang strategis dan akses menuju pasar kedungrejo ini relatif jauh dan harus putar balik dari bunderan cito menuju ke pasar waru baru.

Kedua,Adanya Tarif Parkir. Biaya parkir juga menjadi salah satu dari sekian alasan mengapa pedagang-pedagang yang akan berpindah ke pasar waru baru menjadi berpikir dua kali untuk memindahkan stand dagangannya ke pasar waru baru. Seorang pelanggan akan lebih memilih tempat yang tidak ada pemungutan biaya parkir, meskipun hanya 2000 rupiah yang diberikan kepada tukang parkir. Seorang pelanggan tentunya akan lebih memilih tempat dengan prakir yang gratis.

Ketiga, Tidak adanya Pemerataan dalam Pembagaian stand. Dalam hal pembagian stand pedagang pasar waru mengatakan tidak adanya pemerataan stand hal itu terjadi karena Pihak Dinas memperjual belikan stand kepada pihak luar, dengan harga yang tinggi yaitu 12.000.000-60.000.000 rupiah yang berbeda dengan harga yang sudah ada dalam Peraturan Bupati yang harganya hanya 1.250.000 untuk kios dan 800.000 untuk kios.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Manfaat yang diterima oleh pedagang melalui perbup nomor 22 tahun 2018

Manfaat yang ada dari Kebijakan penataan stand ini bagi kelompok sasaran adalah para pedagang pasar waru lama yang akan ditata kembali dapat menempati tempat yang layak dan penataan ini diharapkan memberikan manfaat dapat mengembalikan fungsi awal dari sarana dan prasarana umum yang sebelumnya tidak dapat digunakan secara baik oleh warga sekitar sekitar pasar itu sendiri. Yang dimaksud sarana adalah sarana jalan untuk memasuki pemukiman warga.Masyarakat dan pedagang mendapatkan berbagai macam manfaat dari Peraturan Bupati ini antara lain:

1) Lokasi pasar waru baru menjadi lebih bersih dan nyaman.
2) Lapak di pasar waru baru lebih rapi dan tertata.
3) Terdapat fasilitas parkir yang luas.
4) Adanya pengelompokan stand passar.

c. Perubahan yang diinginkan dari perbup nomor 22 tahun 2018

Pertama**,** Perubahan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni kondisi masyarakat dengan menata kembali pasar waru yang dianggap sudah tidak layak oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Serta menginginkan tata ruang yang lebih baik dengan diadakannya pembangunan frontage road yang akan dibangun pada tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, perubahan yang diinginkan oleh pedagang passar waru lama itu mengarah kepada sisi ekonominya. Implementasi Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 jika dilihat dari segi ekonominya, masih belum maksimal. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pedagang yang kurang antusias dalam menyambut lokasi pasar waru baru. Hal ini dapat dilihat dengan pindahnya pedagang pasar waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru kembali lagi ke pasar waru lama sehingga menimbulkan kerugian untuk Pemerintah dalam hal PAD. Hal ini dikarenakan banyak pedagang pasar waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru tidak menggunakan standnya secara aktif. Tak aktifnya stand yang ada di pasar waru baru ini karena pedagang pasar waru lama lebih memilih utuk kembali berdagang di pasar waru lama.

Dengan masih menetapnya pedagang pasar waru lama yang memiliki stand di pasar waru baru sehingga stand yang ada dibiarkan, dikosongkan begitu saja, stand yang dikosongkan lama tersebut membuat para pedagang yang yang sudah membeli stand tersebut enggan untuk membayar retribusi untuk perpanjangan stan yang ada di pasar waru baru.

Padahal, retribusi yang ditarik untuk perpanjangan tersebut digunakan pemerintah Sidoarjo untuk memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di pasar waru baru. Dengan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru tersebut yang membayar retribusi itu pemerintah Sidoarjo jadi dirugikan dalam hal PAD.

d. Ketepatan implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

Di dalam ketepatan lingkungan, interaksi antara pembuat kebijakan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pedagang passar waru dilakukan dengan cara sosialisasi dan koordasi, komunikasi intens dengan pedagang yang dilakukan kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Di dalam ketepatan proses, adanya penerimaan dan kesiapan pemindahan dari pedagang mengenai relokasi pasar waru lama, karena memang pada awalnya disperindag sudah melakukan sosalisasi kepada pedagang. Hal ini sesuai dengan pernyataan pihak disperindag, Dalam Proses pemindahan pasar waru lama ke daerah Pasar waru baru Pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar sebagai objek relokasi secara berkelanjutan.

Teori Merilee S Grindle selain melihat dari isi kebijakan yang sudah diterangkan diatas, juga melihat teori implementasi itu dari lingkungan kebijakannya. Jika dikaitkan dengan implementasi perbup maka analisis implementasinya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepentingan dan strategi pihak disperindag untuk merealisasikan kebijakan sesuai Peraturan Bupati.

Dinas Perindustriann dan Perdagangan kabupaten sidoarjo mempunyai peran sebagai eksekutor implementasi perbup yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian msyarakat melalui penataan Pasar. Dalam konteks relokasi passar waru, disperindag memberikan sosialisasi kepada para pedagang tentang pemindahan pasar waru lama yang dianggap kurang nyaman menuju ke pasar waru baru dengan pemberian solusi mengenai harga lapak yang terjangkau, proses administrasi penyewaan lapak yang cepat dan efisien dan lain-lain.

b. Karakteristik Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mengenai Karakteristik Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni disebabkan karena individual dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, yang dimana dalam melakukan kebijakan Penataan Stand dan Penempatan di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo Dinas perindustrian dan Perdagangan selaku Implementator yang dimana awalnya memang berpihak kepada Pemerintah karena pihak Dinas sudah mengupayakan penataan stand dan penempatan pedagangan ke tempat yang telah disediakan. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan koordinasi dengan pihak pasar atau para pedagang pasar waru lama. Meskipun dalam realitanya di lapangan pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan tidak sejalan yakni dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermainkan harga kios atau los dengan mendapatkan keuntungan pribadi. Dikarenakan kios atau los yang awalnya untuk pedagang pasar waru lama diperjual belikan ke pihak luar dengan harga yang berbeda atau dengan harga yang tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang studi kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

   Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang studi kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Pada proses pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal hal ini menyangkut kapatuhan Implementator terhadap Peraturan yang ada. Misalnya saja sosialisasi yang dilakukan selama beberapa tahun hanya dilakukan satu kali dengan dimintai KTP dan KK untuk memenuhi persyaratan memiliki stand, serta adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menjual stand yang seharusnya menjadi jatah pedagang pasar waru lama yang sudah terdaftar di database justru dijual ke pihak luar dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga yang seharusnya. Hal ini sangat berbeda dengan Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 yang menyatakan pedagang yang sudah terdaftar dalam database diberikan prioritas untuk mendapatkan stand.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang studi kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

Problematika yang ada dalam penataan stand dan penempatan pedagang adalah :

Pertama, Tidak adanya pemerataan dalam pembagaian stand Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Implementator dari Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 dalam penataan stand memperjual belikan kepada pihak luar dengan harga yang tinggi.

Kedua, Pedagang pasar waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru kembali lagi ke pasar waru lama karena di Pasar Waru Baru sepi Pelanggan, secara letak pasar waru baru itu dekat dengan Pabrik Paku dan dinilai kurang strategis karena pembeli atau pelanggan yang ingin ke pasar waru baru apabila dari arah Sidoarjo kota pembeli harus putar balik terlebih dahulu ke Bundaran Cito dan untuk pembeli yang jalan kaki mereka harus menyebrangi jembatan penyebrangan lalu jarak ke pasar waru baru jalan kakinya cukup jauh.

Ketiga, Harus membayar parkir apabila masuk ke pasar waru baru, tidak seperti di pasar waru lama di pasar waru baru pembeli atau pedagang yang mau memasuki kawasan pasar waru lama tidak perlu mengeluarkan biaya untuk parkir akan tetapi di pasar waru baru harus membayar parkir sebesar Rp 2000 rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah melakukan interpreasi dan analisa data yang telah di dapat dan disimpulkan serta telah mengetahui problematika Implementasi peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan stand dan penempatan pedagang di pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Maka pada bagaian akhir darri penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik bagi para akademisi dan pemerhati yang mengenai kebijakan penataan pasar. Dan ditujukan pula pada perbaikan Implementasi kebijakan penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Saran tersebut meliputi :

Pertama, Dinas perindustrian dan Perdagangan selaku Implementator dari kebijakan tersebut seharusnya lebih tanggap akan adanya Peraturan Bupati yang baru. Sehingga dalam Pengimplementasiannya tidak terlambat atau jalan ditempat.

Kedua, Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya meyediakan akses jalan alternatif untuk pelanggan ke Pasar Waru Baru agar pelanggan mudah untuk mendatangi Pasar Waru Baru, dengan pertimbangan agar Pasar Waru baru ramai pelanggan dan para pedagang pasar waru baru tidak pindah lagi ke Pasar Waru lama.

Ketiga, seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan memprioritaskan pedagang pasar waru lama ketimbang pedagang lain atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak luar untuk menempati pasar waru baru. Hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kekurangan stand untuk pedagang pasar waru lama.

Keempat, Hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan meniadakan untuk pembayaran parkir apabila masuk ke Pasar waru baru, hal ini bertujuan untuk para pelanggan pasar waru baru bersedia untuk datang ke pasar waru baru sehingga pasar waru baru tidak sepi pelanggan.

Kelima, seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pedagang pasar waru lama contohnya dengan diadakan musyawarah dengan menjelaskan atau memberikan pemahaman ke pedagang pasar waru tentang penataan stand dan penempatan pedagang pasar waru. Hal ini bertujuan untuk memberikan para pedagang tempat untuk mengutarakan pendapat mereka sehingga mencapai sebuah konsensus diantara masing-masing pihak agar mencapai mufakat sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Keenam, apabila diadakan penataan stand dan penempatan pedagang di pasar waru kembali sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memungut biaya untuk membeli stand, akan tetapi mengratiskan pembelian stand , hal ini bertujuan agar penataan stand dan penempatan pedagang dapat mengurangi problematika tidak maunya pasar waru lama dipindahkan serta tidak menghambat poroses penataan tata kota yang akan dibangun frontage road pada tahun 2019 mendatang.

Ketujuh, Seharusnya juga para pedagang pasar waru baru yang kembali lagi ke pasar waru lama membayar retribusi atau perpanjangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kios yang sudah dimiliki oleh pedagang yang kembali ke pasar waru lama, agar tidak merugikan PAD.

Kedelapan, Seharusnya juga Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Implementator agar mengetahui apakah implementator sudah melakukan kebijakan sesuai peraturan atau tidak.

Kesembilan, seharusnya pedagang pasar waru terbuka akan hal kebijakan penataan stand dan penempatan pedagang, karena kebijakan tersebut diadakan untuk kepentingan pedagang pasar waru sendiri untuk memiliki tempat yang layak untuk berjualan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*,Jakarta : Bumi Aksara,1997.

Anderson,James A. *Public Policy Making : Basic Concept in Political sciences.*New York: Praeger University Series,1975.

Agustino,Leo,*Dasar-dasar kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung,2008.

Alisjahbana, Dr. Ir.*Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*.(Surabaya : ITS Press, 2005)

Winarno Budi, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*,Media Presindo.Yogyakarta,2005.

Chandler,Raphl C;Plano, jack C.1988.*The Public Administration Dictionary*.Santa Barbara, California: ABC-Clio

Akib Haedar ,dosen Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, STIA-LAN dan UNISMUH Makassar. Dr. Antonius Tarigan, M.Si., Kasubdit Kerjasama Kelembagaan Bappenas Jakarta

Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey,1980.

Islamy, M Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.Jakarta: Sinar Grafika,1997.

Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000).

Lexy J.Maleong.*Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja, ,2006,).

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara,2003

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin.*Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, t*he Dorsey Press, Chicago-Illionis,1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset,1995).

Soerjono,Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press),1996.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D:*Bandung: Alfaveta,2013.

Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Yogyakarta : UNY press,2010.

Suyanto, Bagong, dkk. *Pasar di Era Otonomi Daerah.*Surabaya : Lutfansah Mediatma,2002.

Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI,2003.

Jurnal dan Penelitian

Wibowo,Anggoro Ari. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar di Pasar Peterongan Semarang).*

Mazidah, Erma Anna (2013) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Usaha Pasar Modern Dan Tradisional Dalam Studi Kasus Perda No. 6 Thn. 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Moderen Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.* Undergraduate Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Website

www.sidoarjokab.go.id

www.kecamatanwarudalamangka2017.com

www.pressrader.kompas.com

Error! Hyperlink reference not valid.

Www.Sjdih.sidoarjokab.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id